

Analisis Value For Money Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Depok Tahun Anggaran 2021-2023

Verliana Diva¹; Sonny Fransisco Siboro²; Anila Ambarani³; Adella Yudanti⁴
Universitas Bina Sarana Informatika

Address: Jl. Kramat Raya No.98, Senen, Jakarta Pusat

Corresponding author: 63210371@bsi.ac.id

Abstract. The aim of this research is to evaluate the financial performance of the Depok City Government in 2021-2023 based on value for money, namely in terms of economy, efficiency and effectiveness. The qualitative descriptive analysis method was used to carry out the analysis in this research. The performance of the Depok City Government is a source of output used to calculate efficiency values. The calculation compares input and output. While the output is the performance that has been achieved by the Depok City Government, the input is the economic value that has been obtained and the calculation of the effectiveness value is based on a comparison between the outcome and the output. Research findings show that the Depok City Government operated very economically from 2021 to 2023 based on its financial performance. The research findings indicate that the financial performance of the Depok City Government in terms of economic and effectiveness for the fiscal years 2021-2023 demonstrate stability, with an average achievement of 85.53% and 103.21% respectively. However, in terms of efficiency, the financial performance of the Depok City Government shows instability, with an average achievement of 84.44%. Therefore, the Depok City Government needs to make improvements to ensure that the efficiency level remains within a stable range.

Keywords: Economy, Efficiency, Effectiveness, Financial Performance, Value for Money

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2021-2023 berdasarkan value for money yaitu dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Kinerja Pemerintah Kota Depok merupakan sumber output yang digunakan untuk menghitung nilai efisiensi. Perhitungannya membandingkan input dan output. Sedangkan outputnya adalah kinerja yang telah dicapai Pemerintah Kota Depok, inputnya berupa nilai ekonomi yang telah diperoleh dan untuk perhitungan nilai efektifitasnya didasarkan pada perbandingan antara outcome dengan output. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok beroperasi dengan sangat hemat pada tahun 2021-2023 berdasarkan kinerja keuangannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok dari segi ekonomis dan efektivitas tahun anggaran 2021-2023 menunjukkan keadaan yang stabil dengan rata-rata pencapaian sebesar 85,53% dan 103,21%. Namun, dari segi efisiensi, hasil kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok menunjukkan ketidakstabilan dengan rata-rata pencapaian sebesar 84,44%. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok harus melakukan peningkatan agar tingkat efisiensi dapat berada pada rentang stabil.

Kata kunci: Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas, Kinerja Keuangan, Value for Money

LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah suatu daerah adalah organisasi yang mengawasi seluruh pelayanan masyarakat dan inisiatif pembangunan. Sesuai dengan konsep otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahannya sendiri. Tujuan pemberian otonomi luas pada suatu daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya peningkatan daya saing dengan mempertimbangkan potensi, keunggulan, pemerataan, dan keadilan wilayah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menguraikan kemampuan pemerintah daerah

dalam membiayai penyelesaian tugas pembangunan, memuat informasi mengenai kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Depok.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintahan harus berjalan secara efektif dan efisien, mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesetaraan dan keadilan dengan memanfaatkan sepenuhnya potensi yang dimiliki daerah. Masyarakat masih mempunyai harapan harian terhadap reformasi positif di semua cabang pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor publik di Indonesia berkembang cukup cepat untuk mendukung penerapan akuntabilitas publik oleh pemerintah pusat dan daerah. Dari sudut pandang ekonomi, operasi komersial yang dapat menghasilkan barang dan jasa publik dianggap sebagai milik sektor publik (Mardiasmo, 2021).

Setiap Kota atau daerah mempunyai hak otonom untuk meningkatkan pendapatan demi kepentingan masyarakat yang tinggal di sana dan kemajuan daerahnya, khususnya di Kota Depok. Efektivitas suatu pemerintahan daerah dapat ditentukan oleh tingginya realisasi pendapatan yang diperoleh warganya. Untuk melacak seberapa baik pemerintah daerah mengalokasikan dana publik yang ditujukan untuk pembangunan tata kelola yang lebih baik, transparansi dan akuntabilitas publik yang diawasi oleh sektor publik sangatlah penting (Mayasari, 2022). Memanfaatkan sumber pendanaan publik secara lebih murah, efektif, dan efisien merupakan topik yang perlu dibenahi dan masih menjadi perhatian utama seluruh pemerintah daerah. Tentu saja, hal ini memerlukan penerapan praktik pengelolaan yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

Pemerintah membuat undang-undang pada tahun 2006 yang menguraikan bagaimana mengelola dana daerah secara transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan terjangkau dengan tetap mematuhi persyaratan hukum. Pemerintah menggunakan sejumlah proses, termasuk pengumpulan informasi, pendokumentasian, pengikhtisaran, dan pelaporan keadaan keuangan, yang menjadi standar akuntansi pemerintah (Nasution, 2021). Di Indonesia, masyarakat memandang sektor pelayanan publik secara negatif karena menganggap sektor tersebut boros, bocor secara finansial, dan merupakan lembaga yang paling dirugikan. Ini tidak terjadi secara acak. Sebaliknya, hal ini sepenuhnya disebabkan oleh kurangnya profesionalisme para petugas di industri jasa.

Value for money merupakan suatu cara bagi masyarakat umum untuk mengevaluasi seberapa baik sektor publik mengelola sumber daya anggaran dan apakah hal tersebut dapat memberikan hasil bagi masyarakat, khususnya dalam hal indikator ekonomi yang efisien dan efektif (Mahmudi, 2015). Prinsip *value for money* sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengukur kinerja sektor publik karena mereka mempunyai sistem

manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang efektif. Tingkat kepercayaan masyarakat suatu daerah terhadap pelayanan publik akan meningkat, bahkan dapat meningkatkan reputasi daerah yang selama ini dipandang kurang baik jika dapat menciptakan keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab serta memberikan pelayanan publik yang baik, khususnya di bidang pelayanan masyarakat. itu melayani.

APBD Depok akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik pada tahun 2020 dan 2021, dan pada tahun 2022 akan lebih berkonsentrasi pada upaya peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih baik guna mendorong kesejahteraan masyarakat. Jumlah yang dialokasikan ke dalam anggaran meningkat drastis hingga lebih dari satu triliun rupiah. Karena pendapatan Kota Depok yang setiap harinya meningkat cukup pesat, pemerintah semakin mahir dalam mendanai dan mengawasi daerah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa potensi pendapatan Kota Depok telah dimanfaatkan dan dikelola secara optimal mengingat total peningkatan pendapatan sebesar 8,83% pada tahun 2018, peningkatan pendapatan sebesar 16,23% pada tahun 2019, dan peningkatan pendapatan sebesar 10,63% pada tahun 2020. Peningkatan pendapatan tahunan tersebut menunjukkan bahwa keuangan atau sumber pendanaan daerah telah dikelola dan digunakan dengan baik.

Khusus di Kota Depok, tingkat kenaikan pendapatan APBD maksimal sama dengan kenaikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) Kota tersebut. Pemerintah akan lebih mudah menawarkan anggaran untuk belanja langsung dan tidak langsung karena pendapatan meningkat. PAD Kota Depok juga menyempurnakan sistem manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahun 2019, dana berjumlah Rp. 125.728.179.033 dialokasikan untuk belanja yang berkaitan dengan kebutuhan daerah. Pengeluaran ini dibagi menjadi dua kategori: pengeluaran langsung sebesar Rp. 12.914.387.810, dan biaya tidak langsung sebesar Rp. 112.813.791.223. Oleh karena itu, pelaksanaan APBD memerlukan kedisiplinan yang lebih tinggi dalam penganggaran, baik pada awal maupun akhir masa pelaksanaan.

Tujuan penggunaan dana anggaran dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, tentunya dengan hasil yang efektif dan efisien, apabila pelaksana dapat menggunakan anggaran tersebut dengan disiplin. Pengelolaan APBD sangat penting untuk mematuhi pengaturan keuangan dan penjadwalan yang paling optimal untuk memungkinkan pelaksanaan pelayanan publik, proyek pembangunan, dan kewajiban pemerintah secara efisien dan hemat biaya. Pembahasan sebelumnya di atas menunjukkan ketertarikan dan keinginan kuat penulis untuk mengkaji prinsip *value for money* dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan fokus pada Depok. Untuk mengevaluasi kinerja sektor

publik Kota Depok, akan diterapkan prinsip *value for money* yang lebih menekankan pada faktor ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan menggunakan metrik *value for money* pada Dinas Kota Depok, penelitian ini berupaya menilai efektivitas Pemerintah Daerah Kota Depok.

KAJIAN TEORITIS

Menurut (melina) secara teori, terminologi biaya berarti penggunaan sumber-sumber ekonomi yang diukur dengan satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu, dan atau manfaat yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo (2021) berfungsi sebagai alat informasi bagi pemerintah dan masyarakat luas dengan menyediakan data pengendalian dan tanggung jawab manajemen. Akuntansi sektor publik, menurut uraian di atas, merupakan suatu alat yang memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya informasi keuangan, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan. Data akuntansi digunakan oleh pemerintah dalam semua tahap pengendalian manajemen, termasuk perencanaan dan pelaporan kinerja.

Laporan Keuangan

Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa salah satu cara untuk menjaga pertanggungjawaban pemerintah negara bagian dan daerah atas pengelolaan dan pelaksanaan keuangannya adalah melalui laporan keuangan. Lalu, jenis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah untuk jangka waktu tertentu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan pemahaman di atas, para ahli dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan hasil akhir dari prosedur akuntansi. Setelah itu, laporan keuangan publik berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengguna untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Value for Money

Menurut Mardiasmo (2021), *value for money* merupakan sebuah konsep manajemen pada perusahaan sektor publik yang bertumpu pada tiga elemen kunci yaitu efikasi, efisiensi, dan keekonomian. Membeli input dengan harga terbaik dengan tetap menjaga kualitas dan kuantitas dianggap ekonomis. Proses mengubah input primer, seperti sumber daya keuangan (mata uang), menjadi input sekunder, seperti tenaga kerja, material, infrastruktur, dan barang modal yang digunakan dalam aktivitas operasional organisasi, merupakan fokus ilmu

ekonomi. Ekonomi adalah studi tentang seberapa besar organisasi sektor publik dapat mengendalikan jumlah sumber daya input yang mereka konsumsi untuk mencegah pengeluaran yang boros dan tidak efisien.

Efisiensi adalah rasio output/input; ini adalah pencapaian keluaran maksimum atas masukan tertentu dengan jumlah penggunaan paling sedikit untuk mencapai tujuan. Output adalah barang atau jasa yang diciptakan dengan menggunakan sumber daya yang digunakan untuk menciptakannya. Sejauh mana hasil program memenuhi target yang telah ditentukan disebut efektivitas. Ketika hasil dibandingkan dengan produksi, efektivitas ditentukan. kemanjuran hubungan antara tujuan dan produksi. Suatu organisasi, program, atau kegiatan akan semakin efektif jika outputnya semakin berkontribusi terhadap pencapaian tujuannya. Efektivitas berfokus pada hasil atau hasil, sedangkan ilmu ekonomi berkonsentrasi pada input dan efisiensi pada output atau proses. Mardiasmo (2021), Meskipun pihak lain berpendapat bahwa ketiga elemen tersebut saja tidak cukup, namun ketiga elemen tersebut merupakan komponen utama nilai uang. Penting untuk memasukkan unsur-unsur tambahan seperti kesetaraan dan keadilan.

Kinerja Keuangan

Kinerja sebagaimana dimaksud dalam PP No. 58 Tahun 2005 adalah hasil atau hasil suatu program atau kegiatan yang akan atau telah tercapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dalam jumlah dan kualitas yang dapat diukur. Kinerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa baik suatu kegiatan, program, atau kebijakan diterapkan dalam mencapai tujuan, visi, dan misi perencanaan strategis organisasi. Sistem pengukuran kinerja diperlukan suatu organisasi untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program. Tujuan dari sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah untuk membantu manajer publik dalam mengevaluasi alat ukur keuangan dan non keuangan. Tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu bisnis menghasilkan pendapatan adalah kinerja keuangannya. Metrik kinerja yang menggunakan indikator keuangan disebut kinerja keuangan.

Memahami Indikator Kinerja

Mardiasmo (2021), Indikator kinerja sangat membantu dalam menunjukkan seberapa baik pendekatan yang dipilih diterapkan. Indikator kinerja mencakup indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan penting bagi organisasi. Area yang menunjukkan seberapa baik fungsi unit kerja suatu organisasi dikenal sebagai faktor keberhasilan yang mendasarinya. area dimana preferensi manajerial tercermin dengan menekankan faktor keuangan dan non-keuangan yang penting dalam keadaan tertentu. Elemen penentu keberhasilan ini perlu terus

beradaptasi dengan perubahan organisasi. Seperangkat metrik yang dikenal sebagai indikator kinerja utama merupakan tolak ukur penting bagi kinerja dan operasi unit bisnis, baik secara finansial maupun non-finansial. Manajer dapat melacak dan mengidentifikasi keberhasilan kinerja dengan indikator ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan. Meleong mengartikan penelitian kualitatif sebagai penyelidikan ilmiah yang mengutamakan komunikasi mendalam antara peneliti dan subjek yang diteliti guna memahami fenomena dalam konteks sosial alamiahnya (Mahsun, 2017). Sebaliknya, penelitian yang membahas suatu gejala, kejadian, atau peristiwa yang terfokus pada suatu permasalahan yang terjadi selama penyelidikan disebut penelitian deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat dilihat dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan, akan digunakan untuk mengkaji data yang diperoleh. Tujuan analisis yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif ini adalah untuk mengkarakterisasi suatu keadaan atau keadaan yang ada pada objek penelitian pada saat penelitian dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mandala Bakery menangani seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Proses produksi roti mandala dilakukan secara rutin selama dua hari sekali. Setiap satu kali produksi, menghasilkan 800 pcs roti dengan total berat 15 kilogram. Sehingga dalam satu bulan, proses produksi dilakukan selama 15 kali dengan menghasilkan 12.000 pcs roti. Berbagai biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik diperlukan untuk menyelesaikan proses produksi.

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Depok merupakan bagian dari kawasan lalu lintas JABODETABEK yang berfungsi sebagai penyangga. Kota Depok terletak pada ketinggian antara 50 hingga 150 meter di atas permukaan laut, dengan garis lintang antara 06° 19' 00" dan 06° 28' 00" Lintang Selatan, dan garis bujur antara 106° 43' 00" dan 106° 55' 30" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Depok kurang lebih 200,29 km², terbagi menjadi 63 kelurahan/desa dan 6 kelurahan. Kecamatan Pancoran Mas merupakan pusat pemerintahan Kota Depok yang terdiri dari enam kelurahan/desa. Wilayah Kota Depok secara administratif terletak di antara Ibu Kota Negara dan dua kabupaten/kota.

Oleh karena itu, peran Kota Depok menjadi sangat penting karena selain sebagai pintu gerbang antara Jawa Barat dan wilayah DKI Jakarta, juga sebagai kawasan pemukiman dan penyangga Ibu Kota Negara lainnya. adalah sebagai berikut : 1. Utara : Kab. Tangerang dan Prov. DKI Jakarta (Provinsi Banten) 2. Selatan : Kab.Provinsi Jawa Barat. Bogor 3. Barat : Kab. Tangerang (Provinsi Banten) dan Kab. Bogor (Provinsi Jawa Barat) 4. Timur : Kab. Provinsi Jawa Barat. Bekasi dan Kab. Bogor Bagian selatan biasanya bergunung-gunung, dengan ketinggian 40–140 m di atas permukaan laut dan kemiringan 2-15%, sedangkan wilayah utara sebagian besar merupakan dataran rendah.

Sedangkan, pembagian wilayah menurut kemiringannya, Kota Depok berkisar antara 8 hingga 15% terlihat di wilayah yang membentang dari barat ke timur. Kemiringan lebih dari lima belas persen terdapat di sepanjang Sungai Cikeas, Ciliwung, dan Angke bagian selatan. Luas penggunaan lahan di Kota Depok adalah sebagai berikut: \pm 10.968 hektar untuk pemukiman, \pm 4.653 hektar untuk pertanian, \pm 344 hektar untuk industri, \pm 91 hektar untuk Rawa Setu, dan \pm 3.973 hektar untuk lainnya. Dari sudut pandang sosial dan demografi, peningkatan tajam jumlah penduduk bertepatan dengan pertumbuhan Kota Depok. Mengingat lokasinya yang bersebelahan dengan ibu kota negara, DKI Jakarta, dan pusat perekonomian negara, Depok pada dasarnya memiliki kapasitas untuk tumbuh secara geografis. Bagi warga Jakarta yang ingin bepergian ke Jawa Barat atau sebaliknya melalui jalur selatan, Depok menjadi pintu masuk antara DKI Jakarta dan Jawa Barat karena posisinya yang menguntungkan.

Pembahasan Hasil Temuan Penelitian

1. Laporan Anggaran Kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2021-2023

Laporan pencapaian anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Depok periode 2021-2023 menjadi sumber data penelitian ini. Informasi di bawah ini merupakan laporan Pemerintah Kota Depok mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021–2023.

Tabel 1.
Pemerintah Kota Depok Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021-2023

ANGGARAN			
Tahun	2021	2022	2023
Pendapatan	3.219.626.075.377	2.859.339.420.432	3.625.878.713.800
Pendapatan Asli daerah	1.349.600.629.760	1.543.043.585.863	1.595.202.767.878
Pendapatan Transfer	1.716.915.474.208	1.316.295.834.569	2.030.675.945.922
Lain-lain pendapatan	153.109.971.409	0	0
Belanja	3.676.759.990.653	4.085.789.603.733	4.114.674.379.248
Belanja Operasi	2.738.033.426.635	2.969.679.434.909	3.070.711.735.552

Belanja Modal	836.618.473.361	1.018.433.648.574	1.007.443.902.442
Belanja tak terduga	102.108.090.657	96.976.520.250	36.518.741.254
Transfer		700.000.000	
Surplus (Defisit)	(457.133.915.276)	(491.621.560.398)	(488.795.665.370)
Pembiayaan			
Penerimaan Daerah	457.133.915.276	585.536.810.396	553.795.665.378
Pengeluaran Daerah	0	93.915.250.000	65.000.000.000
Pembiayaan Netto	457.133.915.276	491.621.560.398	488.795.665.378
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0	0	0

2. Laporan Realisasi Kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2021-2023

Laporan pencapaian anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Depok periode 2021-2023 menjadi sumber data penelitian ini. Informasi di bawah ini merupakan laporan Pemerintah Kota Depok mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2021–2023.

Tabel 2.
Pemerintah Kota Depok Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021-2023

REALISASI			
Tahun	2021	2022	2023
Pendapatan	3.396.023.758.232	2.941.975.353.794	1.495.426.877.959
Pendapatan Asli daerah	1.536.968.635.023	1.642.228.601.282	599.674.622.024
Pendapatan Transfer	1.712.394.211.949	1.280.348.208.127	895.752.255.935
Lain-lain pendapatan	146.660.911.260	19.398.544.385	0
Belanja	5.053.712.322.797	3.614.127.822.783	1.262.805.299.123
Belanja Operasi	2.487.459.718.159	2.669.375.630.106	1.097.834.514.614
Belanja Modal	701.368.258.472	906.347.683.570	152.803.113.313
Belanja tak terduga	78.792.886.479	37.704.509.107	12.167.671.196
Transfer		700.000.000	
Surplus (Defisit)	128.402.895.122	58.528.350.246	332.621.678.836
Pembiayaan	585.536.810.398	550.149.910.644	824.771.589.480
Penerimaan Daerah	457.133.915.276	585.536.810.398	542.149.910.644
Pengeluaran Daerah	0	93.915.250.000	50.000.000.000
Pembiayaan Netto	457.133.915.276	491.621.560.398	492.149.910.644
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	585.536.810.398	542.149.910.644	824.771.489.480

Sumber: Depok.go.id

Analisis Value for Money Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok

Landasan penilaian kinerja pada satuan kerja pemerintah adalah *value for money*. *Value for Money* merupakan konsep manajemen yang berfokus pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas bagi perusahaan sektor publik. Analisis *value for money* yang dilakukan peneliti dengan menggunakan tiga (3) metrik adalah sebagai berikut:

1) Ekonomi

Sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2015) Ilmu ekonomi adalah perbandingan matematis antara suatu masukan dan biaya dalam uang untuk mencapainya. Rumus untuk menghitung tingkat ekonomi adalah sebagai berikut:

$$Ekonomi = \frac{Input}{Nilai Input} \times 100\%$$

Berikut ketentuan yang tercantum dalam Kondisi Perekonomian (Mahsun, 2017):

- Tidak layak secara ekonomi jika rasio yang diperoleh lebih besar dari 100% ($X > 100\%$).
- Dianggap ekonomis jika nilai perbandingannya kurang dari 100% ($X < 100\%$).
- Perekonomian dikatakan seimbang jika nilai perbandingan ($X = 100\%$) sama dengan 100%.

Berikut ini diuraikan analisis metrik ekonomi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2021-2023:

Tabel 3.
Perhitungan Ekonomi

No	Tahun	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pengeluaran	Rasio Ekonomis	Keterangan
1	2021	5.053.712.322.797	3.676.759.990.653	137,45%	Tidak Ekonomi
2	2022	3.614.127.822.783	4.085.789.603.733	88,46%	Ekonomi
3	2023	1.262.805.299.123	4.114.674.379.248	30,69%	Ekonomi

Sumber: Data Diolah 2024

Tabel 3 Perhitungan Ekonomi menghasilkan kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok periode 2021 dinyatakan ekonomis sebab hasil hitungannya kurang dari 100%, sedangkan periode 2022 dan 2023 dinyatakan tidak ekonomis sebab hasil hitungannya lebih dari 100%.

2) Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018), rasio input terhadap output dapat digunakan untuk menghitung efisiensi. Suatu organisasi mempunyai tingkat efisiensi yang lebih tinggi jika keluarannya melebihi pemasukannya. Efisiensi dalam matematika adalah keluaran dibagi masukan, atau keluaran dengan masukan. Rumus untuk menghitung efisiensi adalah sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Ketentuan efisiensi menurut Mahsun (2017), adalah sebagai berikut:

- a) Efisien jika nilai perbandingannya kurang dari 100% ($X < 100\%$).
- c) Efisiensi dikatakan seimbang jika nilai perbandingan yang dicapai sama dengan 100% ($X = 100\%$).
- c) Tidak efisien apabila rasio yang diperoleh lebih besar dari 100% ($X > 100\%$).

Berikut ini diuraikan analisis metrik efisiensi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2021-2023:

Tabel 4.
Perhitungan Efisiensi

No	Tahun	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Keterangan
1	2021	5.053.712.322.797	3.396.023.758.232	148,81%	Tidak Efisien
2	2022	3.614.127.822.783	2.941.975.353.794	122,85%	Tidak Efisien
3	2023	1.262.805.299.123	1.495.426.877.959	84,44%	Efisien

Sumber: Data Diolah 2024

Tabel 4 Perhitungan Efisiensi menghasilkan kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok periode 2023 dinyatakan efisien sebab hasil hitungannya kurang dari 100%, sedangkan periode 2021 dan 2022 dinyatakan tidak efisien sebab hasil hitungannya lebih dari 100%.

3) Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2021) merupakan ukuran seberapa baik atau buruk suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya. Ketika suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan beroperasi dengan sukses. Efektivitas hanya mengevaluasi apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Rumus menghitung khasiatnya adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

Ketentuan Mahsun (2017) menyebutkan ketentuan efektivitas sebagai berikut:

- a) Tidak efektif apabila nilai perbandingannya kurang dari 100% ($X < 100\%$).
- b) Pada dasarnya seimbang jika nilai perbandingan yang dicapai sama dengan 100% ($X = 100\%$).
- c) Efektif apabila rasio yang diperoleh lebih besar dari 100% ($X > 100\%$).

Berikut ini diuraikan analisis metrik ekonomi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2021-2023:

Tabel 5.
Perhitungan Efektivitas

No	Tahun	Anggaran Pengeluaran	Realisasi Pengeluaran	Rasio Efektivitas	Keterangan
1	2021	3.676.759.990.653	3.199.202.687.104	114,93%	Efektif
2	2022	4.085.789.603.733	5.053.712.322.797	80,85%	Tidak Efektif
3	2023	4.114.674.379.248	3.614.127.822.783	113,84%	Efektif

Sumber: Data Diolah 2024

Tabel 5 Perhitungan Efektivitas menghasilkan kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok periode 2021 dinyatakan efektif sebab hasil hitungannya lebih dari 100%, sedangkan periode 2022 dan 2023 dinyatakan tidak efektif sebab hasil hitungannya kurang dari 100%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis *value for money* terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok selama periode 2021-2023, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok secara ekonomis mengalami peningkatan secara keseluruhan. Rasio ekonomis menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 2021 hingga 2023, dengan rata-rata pencapaian sebesar 85,53%, menandakan stabilitas kinerja keuangan selama periode tersebut. Hal ini dapat menginformasikan bahwa keadaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok secara ekonomis dapat dipertahankan agar indeksnya dapat terus berada dalam rentang stabil.

Dari segi rasio efisiensi, terdapat indikasi tidak efisiennya kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok dengan rata-rata pencapaian sebesar 118,7%. Namun demikian, jika dilihat dari sudut pandang rasio efisiensi, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok dari rentang waktu 2021-2023 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 84,44% yang artinya kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok kembali memasuki rentang efisien pada tahun 2023.

Sementara itu, dari segi rasio efektivitas, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan rasio sebesar 113,84% dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 80,85%. Rata-rata pencapaian rasio efektivitas juga berada pada 103,21% yang berarti bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok stabil selama rentang waktu 3 tahun. Namun, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok secara efektivitas masih terdapat ruang untuk peningkatan agar efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok tetap berada dalam rentang stabil.

Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok terus mengupayakan stabilitas dari semua aspek *money of value*. Hal ini dikareterlihat dari stabilitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok di tahun 2023 yang mencakup semua aspek dari *money of value* yakni dengan rasio ekonomis sebesar 30,69%, rasio efisiensi sebesar 84,44%, dan rasio efektivitas sebesar 113,84%.

Saran

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Depok perlu meningkatkan pengelolaan dan evaluasi secara komprehensif, terutama terkait kinerja keuangan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk mencapai hasil program/kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan, memaksimalkan output dengan input minimal, dan memastikan perolehan input berkualitas dengan biaya yang efisien. Untuk memastikan keakuratan temuan penelitian, peneliti selanjutnya diharapkan mempertimbangkan analisis kinerja keuangan dalam rentang waktu yang lebih luas serta menerapkan teknik pengukuran tambahan selain *Value for Money*.

DAFTAR REFERENSI

- Pemerintah Kota Depok. (2020). Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. <https://ppid.depok.go.id/wp-content/uploads/2021/06/RINGKASAN-RANCANGAN-APBD-2020.pdf>
- Wali Kota Depok. (2020). Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. <https://ppid.depok.go.id/wp-content/uploads/2022/03/apbd-2021.pdf>
- Pemerintah Kota Depok. (2022). Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022. <https://ppid.depok.go.id/wp-content/uploads/2022/07/ringkasan-Dokumen-Rancangan-Perda-tentang-APBD-2022.pdf>
- Mardiasmo. (2021). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru* (Mardiasmo (ed.)). Penerbit Andi.
- Mayasari, R. S. E. (2022). *Buku Monograf Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Dan Model Penilaiannya* (J. Febriantoko (ed.)). Deepublish.
- Nasution, A. S. (2021). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Mahmudi, (2015). *Analisis Data Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahsun, M. S. (2017). *Metode Penelitian Bahasa, Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat